

Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia

Terakreditasi Nasional Sinta 4 SK NO 3 / E / KPT / 2019
<https://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jibeka>

PERSEPSI RISIKO PADA PEMERINTAHAN DESA SEBUAH TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANDUNG

Nur Imam Taufik^{1*}, Hafid Aditya Pradesa², Iin Agustina³

^{1,2} Politeknik STIA LAN Bandung, Bandung, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Indonesia

Article's Information

DOI:

10.32812/jibeka.v16i1.353

ISSN:

0126-1258

ISSN-E:

2620-875X

CORRESPONDENCE*:

nurimamtaufik@stialanbandung
.ac.id

ABSTRACT

Based on institutional theory, this study aims to explore the perceptions of risks that arise in the village governance from the perspective of village officials. With village officials as the unit of research analysis, about 62 village officials from developing villages, developed villages, and independent villages in Bandung Regency participated in this study. With an instrument developed to measure respondents' perceptions of risk in several categories of risk impacts that are already taken in previous studies, which are financial, strategic, fraudulent, managerial, and technical related to the management of village government. The five constructs are structured as dimensions of the risk perception model in village governance. The model built within the conceptual framework of the study was tested using two-stage confirmatory factor analysis. The results generally reveal that the managerial risk dimension is the risk with the largest factor weighting when compared to other risk dimension. Thus, findings about risk, particularly managerial risk, may come from people, property or processes involved in providing services that government organizations expect or need.

Keywords: *Village Risk Governance, Risk Management, Risk Perception, Institutional Theory.*

ABSTRAK

Dengan berlandaskan pada teori institusional, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi risiko yang muncul dalam pengelolaan Pemerintahan Desa yang ditinjau dari perspektif perangkat desa. Dengan para perangkat desa menjadi unit analisis penelitian, sebanyak 62 orang perangkat desa yang berasal dari desa berkembang, desa maju, serta desa mandiri yang berada di Kabupaten Bandung berpartisipasi dalam penelitian ini. Dengan instrumen yang dikembangkan untuk mengukur persepsi responden atas risiko dalam beberapa kategori dampak risiko yang telah tersedia, yakni keuangan, strategis, kecurangan, manajerial, serta teknis yang dikaitkan dengan pengelolaan Pemerintahan desa. Kelima konstruk tersebut disusun sebagai dimensi dari model persepsi risiko pada pemerintahan desa. Permodelan yang dibangun dalam kerangka konseptual penelitian diuji dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori dua tahap. Hasil secara umum mengungkap bahwa dimensi risiko manajerial merupakan risiko dengan bobot faktor terbesar jika dibandingkan risiko. Namun risiko yang paling rendah kemungkinannya untuk muncul adalah risiko finansial. Dengan demikian temuan tentang persepsi risiko khususnya risiko manajerial tersebut mungkin berasal dari orang, properti atau proses yang terlibat dalam memberikan layanan yang diharapkan atau dibutuhkan oleh organisasi pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Risiko Pada Pemerintahan Desa, Manajemen Risiko, Persepsi Risiko, Institutional Theory.*



Pendahuluan

Dalam organisasi publik, menilai risiko bersifat penting karena menunjukkan upaya organisasi dalam memperkuat tata kelola secara kelembagaan (Pradesa, Purba, et al., 2021), dan manajemen risiko adalah elemen kunci dari penguatan tata kelola di organisasi sektor publik, dalam hal struktur, proses, nilai perusahaan, budaya, dan perilaku. Ini adalah landasan arsitektur organisasi untuk keberhasilan strategis dan operasional sehingga perlu disesuaikan dengan baik sebagai rangkaian dari proses manajemen dalam kerangka tata kelola. Manajemen risiko telah mengembangkan kegunaan yang sangat besar dan popularitas oleh dunia ilmiah tetapi juga oleh organisasi dan praktisi (Spikin, 2013). Oleh karena itu, meskipun manajemen risiko selalu menjadi bagian dari manusia dan organisasi, itu harus melewati beberapa dekade sebelum pendekatan terpadu akhirnya dipahami dan manfaat dari metodenya terlihat bagi para manajer dan pengambil keputusan (Massingham, 2010; Rana et al., 2019).

Sementara perihal tata kelola organisasi pada pemerintahan desa, hal yang paling sering dibahas adalah bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kemudian kebijakan desa maupun kelembagaan desa yang dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat di desa (Dura, 2016; Yupita & Juita, 2020). Sebagai tambahan bahwa secara spesifik efektivitas manajemen risiko keuangan dapat memprediksi keberhasilan pelaksanaan berbagai proyek dan program pemerintah (Boniface, 2016). Sementara secara institusional, diyakini sampai dengan saat ini masih belum terdapat manifestasi risiko yang dikaji secara kelembagaan pada pemerintahan desa.

Sementara pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintah yang mempunyai kewajiban pelayanan publik dan berbagai bentuk upaya akuntabilitas untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa pada dasarnya akan selalu mengandung risiko baik kecil maupun besar.

Jika membahas tentang persepsi risiko, maka terdapat tiga tema besar yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain keterkaitan persepsi risiko dengan perilaku, faktor persepsi risiko dan deskripsi persepsi risiko (Arini, 2012). Beberapa ranah tentang persepsi risiko telah diulas dalam ragam unit analisis seperti misalnya entrepreneur (Agustina et al., 2021; Agustina & Pradesa, 2020; Grichnik, 2008), sampai kepada para individu yang bekerja di sektor publik (Barrett, 2019; Durst et al., 2020; Zhang et al., 2018). Konsep tentang risiko dapat dipertimbangkan sebagai permasalahan persepsi (Siegrist & Árvai, 2020; Wolff et al., 2019), maka dirasa penting untuk memiliki konsensus mengenai signifikansi relatif dari risiko di seluruh organisasi. Risiko secara mendasar adalah mengandung tiga komponen

penting, yakni kemungkinan, dampak, serta penyebab. Ketiganya penting untuk diketahui dalam proses identifikasi risiko yang benar dan sesuai.

Manajer atau pengelola risiko yang baik, didukung oleh organisasi dengan budaya risiko positif, mencegah atau mengurangi kegagalan, menghasilkan hasil yang lebih baik. Budaya risiko positif juga merupakan pendorong Inovasi dalam organisasi. Jika seorang individu dalam organisasi merasa takut gagal, maka individu tersebut tidak mungkin mengambil risiko yang diperhitungkan dan menjadi inovatif. Jika sebuah organisasi tidak jelas tentang toleransi risikonya, maka sudah semestinya tidak terlalu berharap Inovasi itu dapat terjadi. Manajer risiko yang baik menghasilkan hasil yang inovatif, karena toleransi risiko dari organisasi tempat mereka berada memungkinkan kegagalan, perbaikan, dan pembelajaran di mana pengambilan keputusan dalam proses manajemen risiko dilakukan dengan baik (Brown & Osborne, 2013; Jean-Jules & Vicente, 2021).

Bagaimana masalah risiko masuk ke dalam domain sektor publik, dan bagaimana pemerintah memandangnya, memperhitungkannya, dan mengontekstualisasikannya telah diulas oleh para penulis sebelumnya (Kong et al., 2018; Oulasvirta & Anttiroiko, 2017). Pemerintah harus menjadikan risiko sebagai agenda utama mereka karena dapat menyebabkan distorsi kebijakan jika tidak dikelola dengan baik. Titik awal dalam memahami risiko dalam domain kebijakan publik dan bagaimana pemerintah menghadapinya dimulai dari serangkaian pernyataan

Apakah persepsi perangkat desa atas risiko dalam berbagai kategori dampak dapat menjadi prinsip pemandu dalam membangun sistem manajemen risiko yang lebih baik di pemerintahan desa menjadi salah satu fokus penting dalam pengembangan praktis ke depan, termasuk menjadi bagian dari motif penting perlunya melakukan kajian risiko pada pemerintahan desa. Risiko adalah masalah persepsi, dan beberapa kajian tentang risiko telah mengkonfirmasi hal tersebut (Slovic, 1987; Slovic et al., 2004). Selera risiko berkisar dari 'penghindaran risiko' di satu ujung spektrum hingga 'pencarian risiko' di sisi lain, dengan 'sadar risiko' dan 'menerima risiko yang diperhitungkan' di antara keduanya. Signifikansi atau sifat suatu risiko dapat berubah, sehingga memerlukan pengelolaan lebih lanjut secara berkelanjutan. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa perspektif stakeholder dapat menjelaskan proses identifikasi risiko dalam pemerintahan desa (Pradesa, Agustina, et al., 2021). Sementara aspek rasional dan kalkulatif dari manajemen risiko berfungsi dengan baik dalam menangani risiko tradisional yang dikelola oleh manajer fungsional secara individual (Pradana & Rikumahu, 2014). Pada organisasi pemerintahan desa, hal ini tidak terlepas dari kapasitas secara kelembagaan yang seringkali belum memadai dalam pengelolaan risiko, sebagaimana fokus utama pengelolaan risiko terletak pada area

pengecehan fraud (Saputra et al., 2019; Wijayanti & Hanafi, 2018) terutama pada risiko finansial yang melekat pada alokasi dana desa (Adnan, 2019; Triani & Handayani, 2018).

Dalam penelitian ini, persepsi perangkat desa atas pengelolaan risiko pemerintahan desa dibangun berdasarkan *institutional theory*. Teori institusional menyangkut logika institusional, yang secara luas (tetapi tidak secara universal) untuk asumsi dan pola tindakan bersama yang terbentuk dalam sebuah organisasi (Hwang & Colyvas, 2011; Lammers & Garcia, 2017; Thornton et al., 2013). Teori institusional membantu untuk memahami mengapa organisasi berperilaku seperti yang dilakukan di masyarakat dengan memeriksa di dalam institusinya (Voronov & Weber, 2020). Pengaruh institusional bisa datang dalam berbagai bentuk, dengan beberapa pengaruh diperlukan oleh lembaga pengatur untuk memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintahan desa. Oleh karena itu dalam pemerintahan desa logika institusional ini berfungsi untuk menjelaskan tentang bagaimana penilaian dari perangkat desa atas pengelolaan risiko di organisasinya. Bagaimanapun organisasi perlu memantau risiko secara berkelanjutan dan memiliki kesadaran khususnya terkait dengan tujuan strategisnya (Spikin, 2013; Wijyantini, 2012), mengukur serta tingkat keparahan dan evolusinya, dengan tujuan mempertahankan profil risiko keseluruhan selaras dengan tingkat yang disepakati dengan pemangku kepentingan dari organisasi (Pradana & Rikumahu, 2014).

Pada organisasi pemerintahan desa, logika institusional dapat dilihat sebagai sumber aturan pengambilan keputusan manajerial, dan oleh karena itu riset tentang persepsi risiko dalam penelitian ini dibangun atas dasar kerangka logika institusional dari sebuah pemerintahan desa. Berdasarkan bingkai teori institusional dalam identifikasi risiko pada pemerintahan desa, dapat diketahui lima kategori dampak risiko yang mempunyai kemungkinan muncul di pemerintahan desa, antara lain :

1. Risiko keuangan, merupakan segala bentuk keputusan yang dibuat oleh pemerintahan desa berkaitan dengan aspek keuangan yang berpotensi menimbulkan kerugian.
2. Risiko strategis, merupakan bentuk risiko yang disebabkan karena adanya penetapan dan pelaksanaan kebijakan atau strategi, pengambilan keputusan dari pemerintah desa yang tidak tepat. Selain itu risiko ini dapat disebabkan oleh pemerintah desa yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
3. Risiko kecurangan, merupakan bentuk risiko yang dialami oleh pemerintahan desa karena faktor terjadinya kecurangan yang disengaja, dan berpotensi besar dalam menimbulkan kerugian baik kerugian yang bersifat mater maupun non materi. Bentuk kerugian tersebut dapat diukur dari segi nilai finansial kerugian non material

Menyangkut dengan kerugian yang bersifat non finansial

4. Risiko manajerial, merupakan risiko yang dihadapi oleh pemerintahan desa karena penurunan faktor keunggulan kompetitif dan kinerja yang dihasilkan oleh pemerintahan desa.
5. Risiko teknis. Merupakan bentuk risiko yang dialami oleh pemerintahan desa apabila ada perubahan dampak yang mungkin terjadi pada proyek, sistem, atau seluruh infrastruktur yang ada di pemerintahan desa ketika implementasi tidak berjalan seperti yang diantisipasi sebelumnya.

Metode

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yakni di bulan November 2021, dengan mengidentifikasi kontak potensial para perangkat desa yang tersebar di seluruh pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung. Teknik pengambilan sampel digunakan secara non-acak dengan teknik *snow ball sampling*, pertama-tama dengan memberikan survey kepada responden yang berhasil diidentifikasi dan dikontak oleh peneliti dan kemudian sekaligus meminta rekomendasi kepada responden tersebut tentang calon responden potensial yang berkenan untuk berpartisipasi pada penelitian ini. Dengan cara seperti itu selama satu bulan diperoleh sebanyak 62 perangkat desa dari pemerintah desa di Kabupaten Bandung yang bersedia menjadi responden dan mengisi dengan lengkap kuesioner online yang telah dibagikan. Data yang terkumpul kemudian dikompilasi dan dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif untuk menangkap karakteristik responden maupun nilai rata – rata dari persepsi responden atas setiap indikator dalam instrumen penelitian. Sementara statistik inferensial dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan teknik analisis faktor konfirmatori, yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji tentang sejauhmana makna penting dari masing – masing dimensi dalam mencerminkan penilaian risiko yang dipersepsikan oleh para perangkat desa.

Instrumen tentang persepsi risiko yang dikembangkan pada penelitian ini bertujuan untuk menangkap persepsi tentang sejauhmana kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan dampak masing – masing yang berkaitan dengan Pemerintahan di Desa. Oleh karena itu, operasionalisasi konsep tentang persepsi risiko didasarkan pada beberapa aspek yang terkait dengan kategori dampak risiko yang berkaitan secara institusional, yakni risiko keuangan, risiko strategis, risiko kecurangan, risiko manajerial, serta risiko teknis. Beberapa kriteria dampak risiko yang teridentifikasi tersebut ditelaah pada penelitian terdahulu (Pradesa, Agustina, et al., 2021) tentang identifikasi risiko dengan bingkai teori stakeholder yang mengungkapkan lima dampak risiko dengan kategori tersebut

berdasarkan keterkaitannya dengan masing – masing stakeholder dari Pemerintahan Desa. Mempertimbangkan bahwa konsep risiko dapat dipertimbangkan dalam bentuk persepsi, maka untuk setiap kategori dampak pada risiko tersebut dioperasionalkan dalam bentuk persepsi dari perangkat desa atas kemungkinan terjadinya risiko – risiko yang ada pada lima aspek (finansial atau keuangan, strategis, kecurangan atau *fraud*, manajerial serta teknis) tersebut.

Dalam mempersepsikan risiko, setiap individu sering melihat beberapa berisiko sebuah situasi yang mengandung ketidakpastian tentang hasil atau konsekuensinya dan yang akan ada kemungkinan konsekuensi yang 'buruk'. Namun, risiko dapat dipertimbangkan sebagai hal yang sangat pribadi dan merupakan gagasan intuitif. Oleh karenanya penelitian ini memfokuskan pada penilaian tingkat naluri perangkat desa tentang seberapa berisiko setiap situasi berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan Desa yang dituangkan dalam pernyataan – pernyataan dalam operasionalisasi konsep sebagai berikut.

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep Dalam Penelitian

Dimensi	Indikator
Risiko Keuangan ($\alpha = 0.756$)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan tidak termanfaatkannya seluruh anggaran yang dimiliki oleh desa • Kemungkinan bahwa anggaran tidak dapat dipergunakan dengan baik karena keterbatasan kapasitas yang dimiliki desa • Kemungkinan pengembalian anggaran desa kepada pemerintah dikarenakan program kerja tidak dapat dilaksanakan • Kemungkinan kebijakan Pemerintah tentang Desa yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa
Risiko Strategis ($\alpha = 0.685$)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan program kerja desa yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target dalam perencanaan • Kemungkinan reputasi desa yang menurun karena kurangnya citra dan kepercayaan dari masyarakatnya • Kemungkinan penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan pada pemerintahan Desa yang disebabkan konflik kepentingan. • Kemungkinan penyalahgunaan wewenang perihal keuangan pada pemerintahan Desa yang disebabkan perilaku tidak terpuji dari oknum yang ada di Desa
Risiko Fraud ($\alpha = 0.872$)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan kesalahan yang disengaja (human error) dalam penggunaan anggaran Desa untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perencanaan Desa • Kemungkinan kompetensi manajerial pada pengelolaan Desa yang tidak memenuhi standar
Risiko Manajerial ($\alpha = 0.821$)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan terjadinya kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan di Desa • Kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian diantara pelaksanaan dengan perencanaan yang telah disusun oleh pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan ketidaksiapan teknologi yang dimiliki dalam pengelolaan pemerintahan desa
Risiko Teknis ($\alpha = 0.919$)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai standar profesionalisme dalam pengelolaan pemerintahan Desa

- Kemungkinan ketidaksiapan sistem dalam pengelolaan pemerintahan desa didasarkan pada infrastruktur sistem yang masih belum memenuhi standar
- Kemungkinan persyaratan dalam pekerjaan pada aspek pengelolaan Pemerintahan Desa yang tidak atau belum memenuhi standar

Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini diukur dengan skala likert 1 – 5 (1 = sangat jarang s.d. 5 = sangat sering) yang mengukur nilai tentang frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko tersebut yang dipersepsikan oleh responden. Penelitian ini juga melakukan prosedur uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan untuk memastikan bahwa kelayakan dari instrumen penelitian dapat terjamin sehingga dapat mengukur nilai yang ingin diukur dengan baik. Hasil nilai koefisien realibilitas *Cronbanch's Alpha* untuk risiko finansial ($\alpha = 0.756$), risiko strategis ($\alpha = 0.685$), risiko kecurangan ($\alpha = 0.872$), risiko manajerial ($\alpha = 0.821$), dan risiko teknis ($\alpha = 0.919$). Hasil menunjukkan bahwa semua konstruk variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,60; maka disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2 Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Kategori Desa		
Desa Berkembang	12	19.4
Desa Maju	23	37.1
Desa Mandiri	27	43.5
Jumlah	62	100.0
Keikutsertaan Pada Sosialisasi Atau Bimtek Tentang Risiko		
Ya, pernah	40	64.5
Tidak, belum pernah	22	35.5
Jumlah	62	100.0
Penilaian Atas Pengelolaan Risiko Pemerintahan Desa		
Tidak Baik	1	1.6
Kurang Baik	1	1.6
Sedang	13	21.0
Baik	42	67.7
Sangat Baik	5	8.1
Jumlah	62	100.0

Dari tabel 2 tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden dari perangkat desa yang berpartisipasi dalam penelitian ini berasal dari desa di area Kabupaten Bandung yang masuk kategori Desa Mandiri (27 orang perangkat desa atau 43,5 persen dari responden). Sementara sisanya 23 orang perangkat desa atau 37,1 persen responden dari desa di Kabupaten Bandung yang dikategorikan desa maju, dan sebanyak 12 orang perangkat desa atau 19,4 persen responden berasal dari desa yang dikategorikan desa berkembang. Sementara dari Keikutsertaan pada sosialisasi atau bimtek

tentang risiko yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung, mayoritas 40 orang perangkat desa atau 64,5 persen responden menjawab pernah mengikuti, sementara sisanya sebanyak 22 orang atau 35,5 persen responden menjawab belum pernah. Selanjutnya responden juga diminta memberikan penilaiannya atas pengelolaan risiko pemerintahan desa di tempatnya, yang menunjukkan bahwa 43 orang perangkat desa atau 67,7 persen responden memberikan pernyataan bahwa pengelolaan risiko di Pemerintahan desanya sudah berjalan dengan baik. Sebanyak 13 orang perangkat desa atau 21 persen responden menjawab pengelolaan risiko di Pemerintahan desanya telah berjalan dalam kategori sedang, hanya lima orang perangkat desa yang memberikan penilaian pengelolaan risiko sangat baik dan masing-masing satu orang menjawab pengelolaan risiko di Pemerintahan Desanya berjalan sangat tidak baik dan tidak baik. Ragam penilaian tersebut menunjukkan bahwa aspek tentang pemahaman risiko yang dimiliki oleh perangkat desa sangat menarik. Meskipun mayoritas perangkat desa yang ada di Kabupaten Bandung diketahui telah mengikuti sosialisasi dan bimtek tentang risiko (40 orang atau 64,5 persen), jumlah yang hampir sama (42 orang atau 67,7 persen) menilai bahwa pengelolaan risiko pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung dapat dikategorikan baik.

Tabel 3 Koefisien Bobot Faktor Untuk Indikator Pada Dimensi Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa

Konstruk	Item	Bobot Faktor	Mean
	Kemungkinan tidak termanfaatkannya seluruh anggaran yang dimiliki oleh desa	0,816	1,58
Risiko Keuangan	Kemungkinan anggaran tidak dapat dipergunakan dengan baik karena keterbatasan kapasitas	0,865	1,65
	Kemungkinan pengembalian anggaran desa dikarenakan program kerja tidak dapat dilaksanakan	0,821	1,24
	Kemungkinan kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa	0,773	2,40
Risiko Strategis	Kemungkinan program kerja desa yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target	0,746	1,90
	Kemungkinan reputasi desa yang menurun karena kurangnya citra dan kepercayaan dari masyarakatnya	0,839	1,90

	Kemungkinan penyimpangan keuangan pada pemerintahan Desa yang disebabkan konflik kepentingan.	0,869	1,60
Risiko Kecurangan (Fraud)	Kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang disebabkan perilaku tidak terpuji dari oknum di Desa	0,919	1,47
	Kemungkinan kesalahan disengaja dalam penggunaan anggaran Desa untuk tujuan yang tidak sesuai	0,889	1,61
	Kemungkinan kompetensi manajerial pada pengelolaan Desa yang tidak memenuhi standar	0,766	2,05
Risiko Manajerial	Kemungkinan terjadinya kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa yang tidak sesuai kebutuhan di Desa	0,911	1,73
	Kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian diantara pelaksanaan dengan perencanaan yang telah disusun oleh pemerintahan Desa	0,893	1,89
	Kemungkinan ketidaksiapan teknologi yang dimiliki dalam pengelolaan pemerintahan desa	0,907	2,29
Risiko Teknis	Kemungkinan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai standar profesionalisme pengelolaan pemerintahan Desa	0,854	1,92
	Kemungkinan ketidaksiapan sistem dalam pengelolaan pemerintahan desa didasarkan pada infrastruktur sistem yang masih belum memenuhi standar	0,919	2,05
	Kemungkinan persyaratan dalam pekerjaan pada aspek pengelolaan Pemerintahan Desa yang tidak atau belum memenuhi standar	0,913	2,03

Berdasarkan Tabel 3 tersebut mengungkap bahwa hasil nilai koefisien bobot faktor dan varians untuk setiap dimensi yakni (1) risiko finansial (berkisar dari 0,816 sampai dengan 0,865), kemudian (2) risiko strategis (berkisar dari 0,746 sampai dengan 0,839), serta (3) risiko kecurangan (berkisar dari 0,869 sampai dengan 0,919), selanjutnya (4) risiko manajerial (berkisar dari 0,766 sampai dengan 0,911), dan terakhir risiko teknis (berkisar dari 0,854 sampai dengan 0,919). Hasil dari bobot faktor untuk setiap indikator pada dimensi persepsi risiko menunjukkan nilai yang tinggi.

Nilai bobot faktor untuk masing – masing indikator pada dimensi risiko finansial, risiko strategis, risiko kecurangan, risiko manajerial, risiko teknis adalah signifikan ($p < 0.01$).

Untuk masing – masing aspek, dapat dicermati bahwa risiko finansial pada pemerintahan desa oleh kemungkinan bahwa anggaran tidak dapat dipergunakan dengan baik karena keterbatasan kapasitas yang dimiliki desa ($\lambda = 0,865$). Sementara risiko strategis pada pemerintahan desa cenderung direfleksikan oleh kemungkinan reputasi desa yang menurun karena kurangnya citra dan kepercayaan dari masyarakatnya ($\lambda = 0,839$). Kemudian risiko kecurangan pada pemerintahan desa paling direfleksikan oleh kemungkinan penyalahgunaan wewenang perihal keuangan pada pemerintahan Desa yang disebabkan perilaku tidak terpuji dari oknum yang ada di desa ($\lambda = 0,919$). Pada aspek dimensi keempat dari risiko pada pemerintahan desa yakni risiko manajerial cenderung ditunjukkan oleh kemungkinan terjadinya kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan di Desa ($\lambda = 0,911$). Sementara dimensi risiko pada pemerintahan desa yang terakhir yakni risiko manajerial paling direfleksikan oleh kemungkinan ketidaksiapan teknologi yang dimiliki dalam pengelolaan pemerintahan desa ($\lambda = 0,919$).

Tabel 4 Bobot Faktor Dan Mean Dimensi Risiko Pada Pemerintahan Desa

Dimensi	Koefisien Bobot Faktor	Mean
Risiko Finansial	0,580	1,489
Risiko Strategis	0,828	2,070
Risiko Fraud	0,825	1,559
Risiko Manajerial	0,906	1,887
Risiko Teknis	0,868	2,073

Berdasarkan Tabel 4 tersebut dapat terlihat nilai bobot faktor pada masing – masing dimensi persepsi risiko pada pemerintahan desa. Hasil pengujian analisis faktor menunjukkan nilai koefisien bobot faktor dimana risiko manajerial adalah risiko yang mempunyai nilai bobot faktor terbesar sebagai dimensi persepsi risiko pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Hal sebaliknya berlaku pada dimensi risiko finansial, yang ditemukan mempunyai nilai koefisien bobot faktor terendah, yakni sebesar 0.580. Kemudian jika dilihat dari nilai mean pada Tabel 4 serta rentang nilai indikator pada Tabel 2 untuk masing – masing dimensi persepsi risiko tersebut dapat diketahui bahwa:

- (1) Risiko finansial (mean masing – masing indikator berkisar dari 1,24 sampai dengan 1,65) mempunyai nilai sebesar 1,49 yang berarti bahwa risiko finansial dinilai sangat jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.

- (2) Risiko strategis (mean masing – masing indikator berkisar dari 1,90 sampai dengan 2,40) mempunyai nilai sebesar 2,07 yang berarti bahwa risiko strategis masuk kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.
- (3) Risiko kecurangan (mean masing – masing indikator berkisar dari 1,47 sampai dengan 1,61) mempunyai nilai sebesar 1,56 yang berarti bahwa risiko kecurangan masuk kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.
- (4) Risiko manajerial (mean masing – masing indikator berkisar dari 1,73 sampai dengan 2,05) mempunyai nilai sebesar 1,89 yang berarti bahwa risiko manajerial masuk kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.
- (5) Risiko teknis (mean masing – masing indikator berkisar dari 1,92 sampai dengan 2,29) mempunyai nilai sebesar 2,07 yang berarti bahwa risiko teknis masuk kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui dari penilaian perangkat desa pada kelima persepsi risiko pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Diantara kelima dimensi persepsi risiko tersebut, hanya risiko finansial yang ditemukan nilai kemungkinannya sangat jarang terjadi. Kondisi ini selaras dengan upaya berkelanjutan dari pemerintah dalam memperkuat pengawasan serta penguatan tata kelola keuangan di desa (Dura, 2016; Kadir & Moonti, 2018; Martini et al., 2019) sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat segera tercapai.

Dalam risiko finansial, penilaian kemungkinan pengembalian anggaran desa dikarenakan program kerja tidak dapat dilaksanakan ini masuk dalam kategori nilai terendah. Berbagai bentuk mitigasi telah diupayakan untuk menanggulangi hal ini sebagai contoh dengan memperkuat aspek pengelolaan dana desa sebagai upaya peningkatan tata kelola organisasi pemerintahan desa (Hulu et al., 2018; Triani & Handayani, 2018). Sementara empat dimensi persepsi risiko lainnya yakni risiko strategis, risiko kecurangan, risiko manajerial serta risiko teknis mempunyai kategori jarang terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Sementara secara empiris masing – masing dimensi dari risiko pada pemerintahan desa mempunyai nilai bobot faktor yang bermakna penting, artinya risiko finansial, risiko strategis, risiko kecurangan, risiko manajerial, maupun risiko teknis merupakan risiko-risiko yang dapat merefleksikan persepsi risiko yang mempunyai kemungkinan untuk muncul pada pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung. Meskipun dalam penilaian secara komprehensif dapat diketahui bahwa nilai kemungkinan munculnya risiko – risiko tersebut tergolong rendah (jarang dan sangat jarang).

Secara praktis tidak mungkin bagi pemerintahan desa hanya melalui perangkat desa saja yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memvalidasi seluruh risiko sektor publik di

tingkat pemerintahan desa untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip pengendalian internal, maupun meminimalkan dampak risiko yang merugikan. Namun secara praktis berdasarkan hasil temuan penelitian ini salah satu implikasi ke depan adalah perlunya mengembangkan standar yang tepat dalam pengelolaan risiko di pemerintahan desa. Standar tersebut menjelaskan secara rinci peran khusus yang harus diselesaikan oleh para stakeholder di entitas publik lokal pemerintahan desa, sampai kepada setiap unit dan individu untuk penerapan manajemen risiko dalam organisasi pemerintahan desa.

Dalam kasus pemerintah desa misalnya, ini akan menjadi kasus bagi kepala desa yang terpilih, yang akan memastikan bahwa prosedur dan delegasi kebijakan yang benar akan ada dan risiko itu dikelola dengan tepat di dalam organisasi pemerintahan desa yang dipimpinya. Di sisi lain, meskipun risiko finansial dan manajerial memerlukan keterlibatan hierarki tertinggi dalam organisasi, risiko - risiko tersebut akan dimungkinkan untuk diterapkan di tingkat yang lebih rendah misalkan pada unit atau bagian di pemerintahan desa. Dalam perspektif itu, risiko manajerial akan hadir dalam fungsi dan layanan organisasi sehari-hari. Dengan demikian, risiko tersebut mungkin berasal dari orang, properti, atau proses yang terlibat dalam memberikan layanan yang diharapkan atau dibutuhkan oleh organisasi. Dalam hal ini sekiranya dapat menjelaskan mengapa risiko manajerial merupakan hal terpenting bagi perangkat desa dalam mencerminkan persepsi risiko yang dirasakannya.

Selain itu, dengan mengandalkan kerangka peraturan atau regulasi yang sudah ada baik di tingkatan daerah maupun nasional, disarankan agar pengelolaan risiko sektor publik pada pemerintahan desa harus mengadopsi kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif yang secara koheren mengintegrasikan faktor-faktor kunci keberhasilan penting yang mencakup budaya penghindaran risiko, struktur manajemen risiko, pelatihan dan pengembangan, tata kelola dan etika yang baik. Ke depan, fokus pengelolaan risiko tidak hanya berkutat pada area finansial saja, tetapi juga pada risiko yang mempunyai kriteria dampak lain tidak hanya dampak keuangan semata.

Kesimpulan

Teori institusional menjadi landasan penting dalam menganalisis persepsi pengelolaan risiko pada pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Hasil empiris dalam penelitian ini maupun beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa fokus utama dalam pengelolaan risiko di pemerintahan desa adalah pada pengelolaan keuangannya. Risiko yang dinilai paling rendah kemungkinannya untuk terjadi adalah risiko finansial. Temuan hasil penelitian ini memperkuat dari segala bentuk upaya pemerintah untuk memperkuat

tata kelola pemerintah desa terutama pada aspek pengelolaan keuangannya. Di sisi lain risiko yang mempunyai nilai bobot terbesar adalah tentang risiko manajerial. Bagi para perangkat desa, risiko manajerial menjadi hal terpenting yang merefleksikan risiko pada pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung.

Penelitian ini mencakup beberapa keterbatasan, antara lain : Pertama, pendekatan empiris yang dihasilkan pada penelitian ini bergantung pada tanggapan yang diperoleh dari perangkat desa Kabupaten Bandung. Oleh karena itu penelitian ini tidak menyelidiki perspektif stakeholder dari pemerintah desa lainnya yang ada di Kabupaten Bandung. Keterbatasan selanjutnya adalah penggunaan desain *cross sectional*, yang hanya menangkap fenomena empiris pada satu waktu tertentu. Sehingga desain longitudinal untuk penelitian selanjutnya dapat menjawab keterbatasan ini sekaligus mengungkap fakta empiris lain bagi pemerintahan desa untuk mengelola faktor kontingensi yang berpotensi muncul. Ke depan, peran manajemen dan pengendalian yang efektif atas keuangan organisasi dan pengaruh faktor eksternal pada pemerintahan desa dapat diperluas area cakupannya baik yang dapat dipotret di area Kabupaten Bandung maupun di daerah lainnya. Kemudian untuk menilai tentang seberapa baik risiko pada pemerintahan desa, aspek atau dimensi risiko yang dipergunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai keajegan yang layak sehingga disarankan untuk dapat diuji pada unit analisis atau sampel lainnya.

Daftar Pustaka

- Adnan, H. (2019). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 151. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>
- Agustina, I., Bin Ajis, M. N., & Pradesa, H. A. (2021). Entrepreneur's perceived risk and risk-taking behavior in the small-sized creative businesses of tourism sector during COVID-19 pandemic. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 18(2), 187. <https://doi.org/10.31106/jema.v18i2.12563>
- Agustina, I., & Pradesa, H. A. (2020). Gender Differences in Risk Taking Among Entrepreneurs: Case on Small Medium Enterprise in Malang. *Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ)*, 2(2), 63–72. <https://doi.org/10.22225/wmbj.2.2.1939.63-72>
- Arini, A. T. (2012). Persepsi Risiko di Indonesia: Tinjauan Kualitatif Sistematis. *Buletin Psikologi*, 20(1–2), 66–81. <https://doi.org/10.22146/bpsi.11949>
- Barrett, P. (2019). New development: Managing risk for better performance—not taking a risk can actually be a risk. *Public Money and Management*, 0962.

<https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1654321>

- Boniface, O. (2016). Financial Risks Management in Public Sector Organisations. *Research Journal of Finance and Accounting Wwww.liste.Org ISSN*, 7(1), 94–106. www.iiste.org
- Brown, L., & Osborne, S. P. (2013). Risk and Innovation: Towards a framework for risk governance in public services. *Public Management Review*, 15(2), 186–208. <https://doi.org/10.1080/14719037.2012.707681>
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32.
- Durst, S., Lindvall, B., & Bruns, G. (2020). Knowledge risk management in the public sector: insights into a Swedish municipality. *Journal of Knowledge Management*, 24(4), 717–735. <https://doi.org/10.1108/JKM-12-2017-0558>
- Grichnik, D. (2008). Risky choices in new venture decisions - Experimental evidence from Germany and the United States. *Journal of International Entrepreneurship*, 6(1), 22–47. <https://doi.org/10.1007/s10843-008-0019-5>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Hwang, H., & Colyvas, J. A. (2011). Problematizing actors and institutions in institutional work. *Journal of Management Inquiry*, 20(1), 62–66. <https://doi.org/10.1177/1056492610387705>
- Jean-Jules, J., & Vicente, R. (2021). Rethinking the implementation of enterprise risk management (ERM) as a socio-technical challenge. *Journal of Risk Research*, 24(2), 247–266. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1750462>
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan)*, 6(3), 431–442.
- Kong, Y., Lartey, P. Y., Bah, F. B. M., & Biswas, N. B. (2018). The Value of Public Sector Risk Management: An Empirical Assessment of Ghana. *Administrative Sciences*, 8(3), 40. <https://doi.org/10.3390/admsci8030040>
- Lammers, J. C., & Garcia, M. A. (2017). Institutional Theory Approaches. In C. R. Scott, L. Lewis, J. R. Barker, J. Keyton, T. Kuhn, & P. K. Turner (Eds.), *The International Encyclopedia of Organizational Communication* (pp. 1–10). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118955567.wbieoc113>

- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Massingham, P. (2010). Knowledge risk management: A framework. *Journal of Knowledge Management*, 14(3), 464–485. <https://doi.org/10.1108/13673271011050166>
- Oulasvirta, L., & Anttiroiko, A. V. (2017). Adoption of comprehensive risk management in local government. *Local Government Studies*, 43(3), 451–474. <https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1294071>
- Pradana, Y. A., & Rikumahu, B. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika*, 13(2), 195. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v13i2.614>
- Pradesa, H. A., Agustina, I., Taufik, N. I., & Mulyadi, D. (2021). Stakeholder Theory Perspective in the Risk Identification Process in Village Government. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 5(1), 17–27. <https://doi.org/10.30741/adv.v5i1.665>
- Pradesa, H. A., Purba, C. O., & Priatna, R. (2021). Menilai risiko dari organisasi yang bertransformasi: pelajaran terbaik untuk penguatan akuntabilitas pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(2), 146–158.
- Rana, T., Wickramasinghe, D., & Bracci, E. (2019). New development: Integrating risk management in management control systems—lessons for public sector managers. *Public Money and Management*, 39(2), 148–151. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580921>
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Piliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Siegrist, M., & Árvai, J. (2020). Risk Perception: Reflections on 40 Years of Research. *Risk Analysis*, 40(0), 2191–2206. <https://doi.org/10.1111/risa.13599>
- Slovic, P. (1987). Perception of Risk. *Science*, 236(4799), 280–285.
- Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2004). Risk as Analysis and Risk as Feelings: Some Thoughts about Affect, Reason, Risk, and Rationality. *Risk Analysis*, 24(2), 311–322. <https://doi.org/10.1111/j.0272-4332.2004.00433.x>
- Spikin, I. C. (2013). Risk Management theory: the integrated perspective and its application

- in the public sector. *Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública*, 0(21), 89–126.
<https://doi.org/10.5354/07117-6759.2013.29402>
- Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2013). The Institutional Logics Perspective. *The Institutional Logics Perspective*, 1–22.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199601936.001.0001>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Voronov, M., & Weber, K. (2020). People, Actors, and the Humanizing of Institutional Theory. *Journal of Management Studies*, 57(4), 873–884.
<https://doi.org/10.1111/joms.12559>
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.
- Wijyantini, B. (2012). Model Pendekatan Manajemen Risiko. *Jeam*, XI(2), 57–64.
- Wolff, K., Larsen, S., & Øgaard, T. (2019). How to define and measure risk perceptions. *Annals of Tourism Research*, 79(July). <https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102759>
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 56. <https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.176>
- Zhang, F., Welch, E. W., & Miao, Q. (2018). Public organization adaptation to extreme events: Mediating role of risk perception. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(3), 371–387. <https://doi.org/10.1093/jopart/muy004>